



LAPORAN KINERJA

**BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	5
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	5
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	7
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.....	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	17
A. Pencapaian Skor	17
B. Rincian Skor per Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
C. Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama	21
D. Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	35
A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Secara Umum	35
B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya	36
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Sebagai salah satu unit pelaksana dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja ini merupakan cerminan dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Kinerja berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus dan BPK RI secara keseluruhan.

Banjarbaru, Januari 2020

Kepala Perwakilan


Tomanda Syafullah
NIP 197202021996031003 8

DAFTAR TABEL

- 1.1 Komposisi SDM
- 2.1 Target Pencapaian IKU Tahun 2019
- 3.1 Pencapaian IKU Tahun 2019
- 3.2 Perbandingan IKU Tahun 2017 s.d. 2019
- 3.3 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019
- 4.1 Skor Sasaran Strategis

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Struktur Organisasi
- 2.1 Peta Strategi BPK *Wide*
- 2.2 Peta Strategi AKN VI
- 2.3 Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
- 3.1 Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2017 s.d. 2019
- 3.2 Penyerahan LHP kepada Entitas Pemeriksaan
- 3.3 Acara Media *Workshop* dan Sosialisasi Ke-BPK-an
- 3.4 Pelaksanaan Diklat LKPD Berbasis Akrua
- 3.5 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan tugas UU tersebut dilakukan oleh BPK dibantu oleh pelaksana BPK diantaranya Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN VI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

AKN VI didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN VI dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN VI dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif.
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa.

- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.
- p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi sistem manajemen pemeriksaaan (SMP) dan daftar entitas pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- r. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan berada di bawah AKN VI dan bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan terdiri dari Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Selatan I, Subauditorat Kalimantan Selatan II, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum.

2. Subauditorat Kalimantan Selatan I

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Subauditorat Kalimantan Selatan II

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

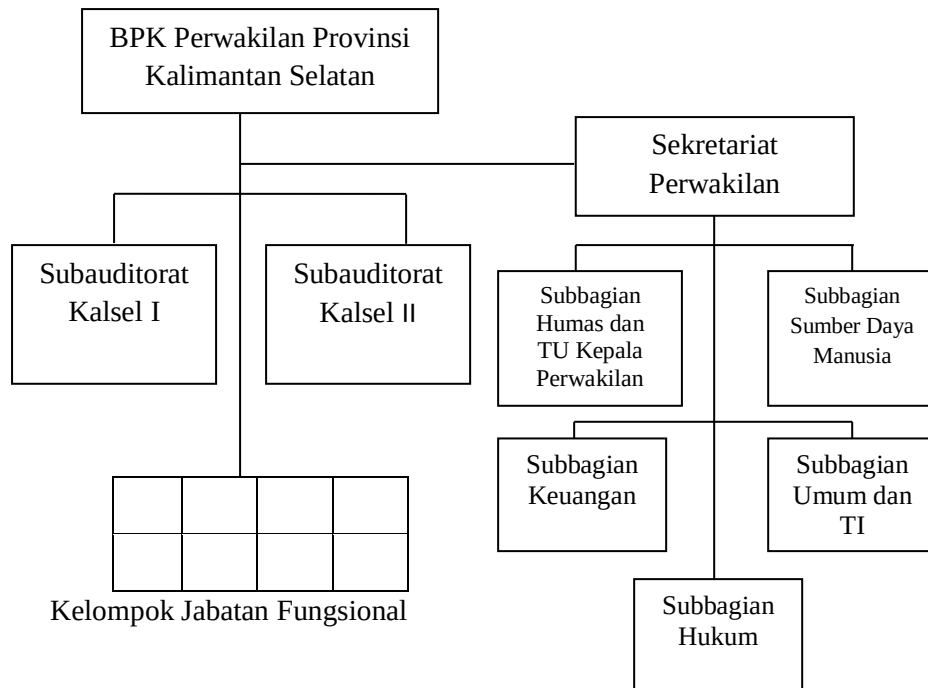
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan I dan II adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan rencana kegiatan.
- b. Mengusulkan tim pemeriksa.
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan.
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah.
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan.
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa.
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2019 berjumlah 143 orang dengan rincian di tabel 1.1.

Uraian	Jumlah (Orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat	1
Kepala Subbagian	5
Pemeriksa	66
Administrasi Umum	34
Pegawai Kontrak	16
CPNS	18
Jumlah	143

Tabel 1.1 Komposisi SDM

2. Anggaran

Pagu anggaran semula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebesar Rp22.272.199.000,00 dan setelah revisi sebesar Rp24.151.977.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

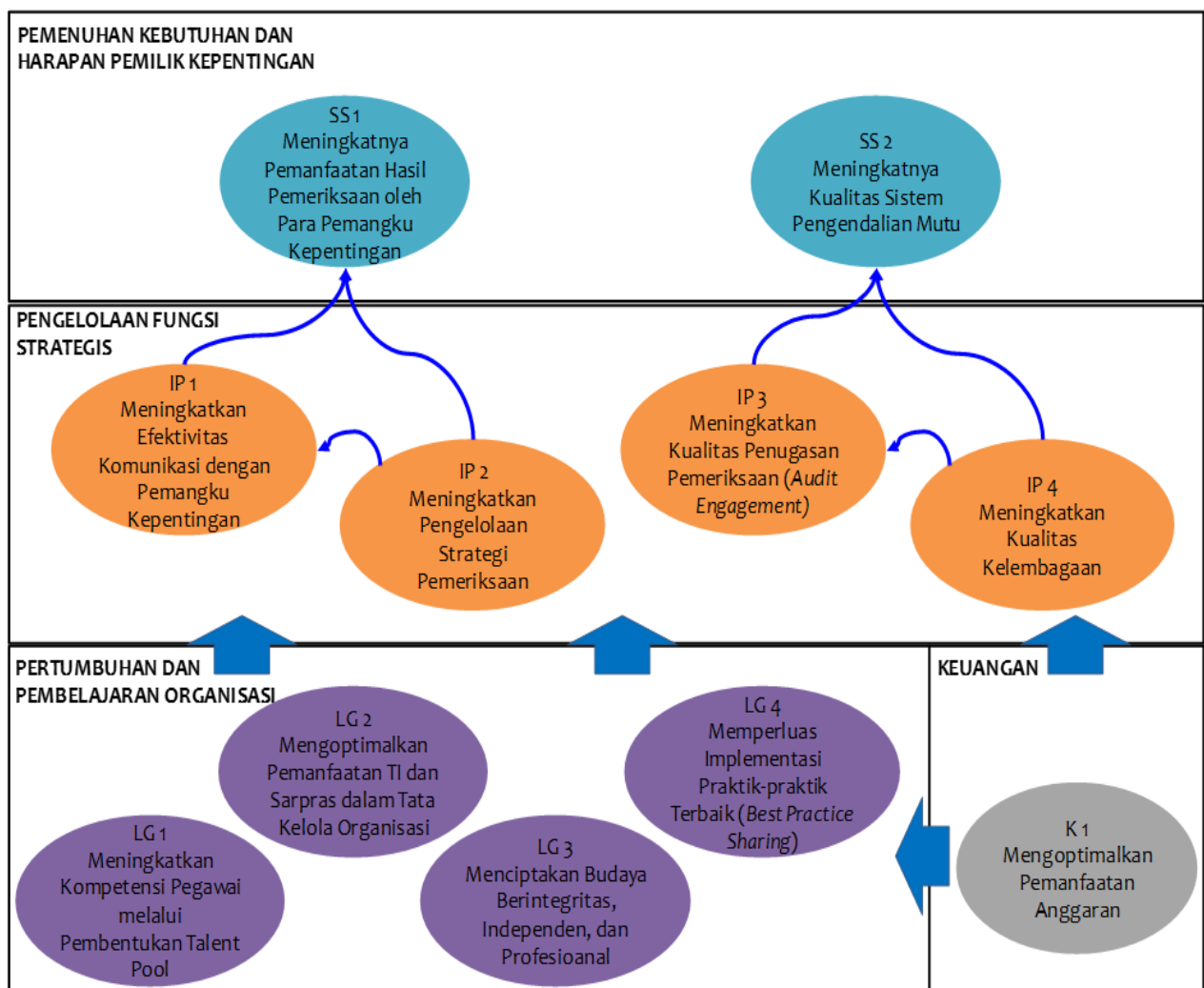
- Kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara sebesar Rp10.645.176.000,00.
- Kegiatan layanan sekretariat perwakilan sebesar Rp1.670.798.000,00.
- Kegiatan layanan internal (overhead) sebesar Rp1.045.100.000,00.
- Kegiatan layanan perkantoran sebesar Rp10.790.903.000,00.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Perencanaan Strategis

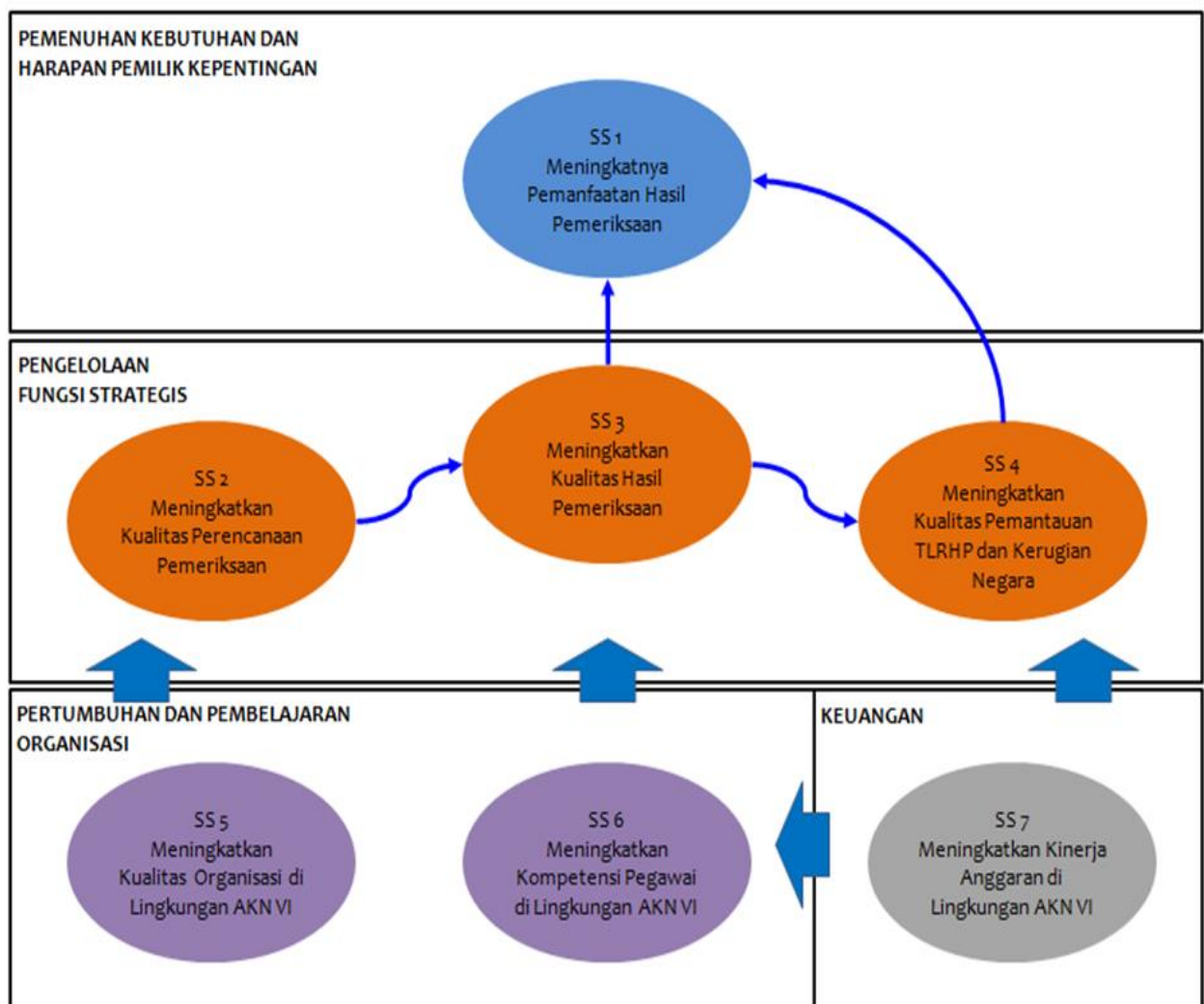
Perencanaan Strategis (Renstra) BPK 2016 – 2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. BPK menetapkan dua sasaran strategis (SS) untuk mencapai tujuan strategis tersebut, yang digambarkan dalam bentuk peta strategi BPK *Wide* sebagai berikut.



Gambar 2.1 Peta Strategi BPK *Wide*

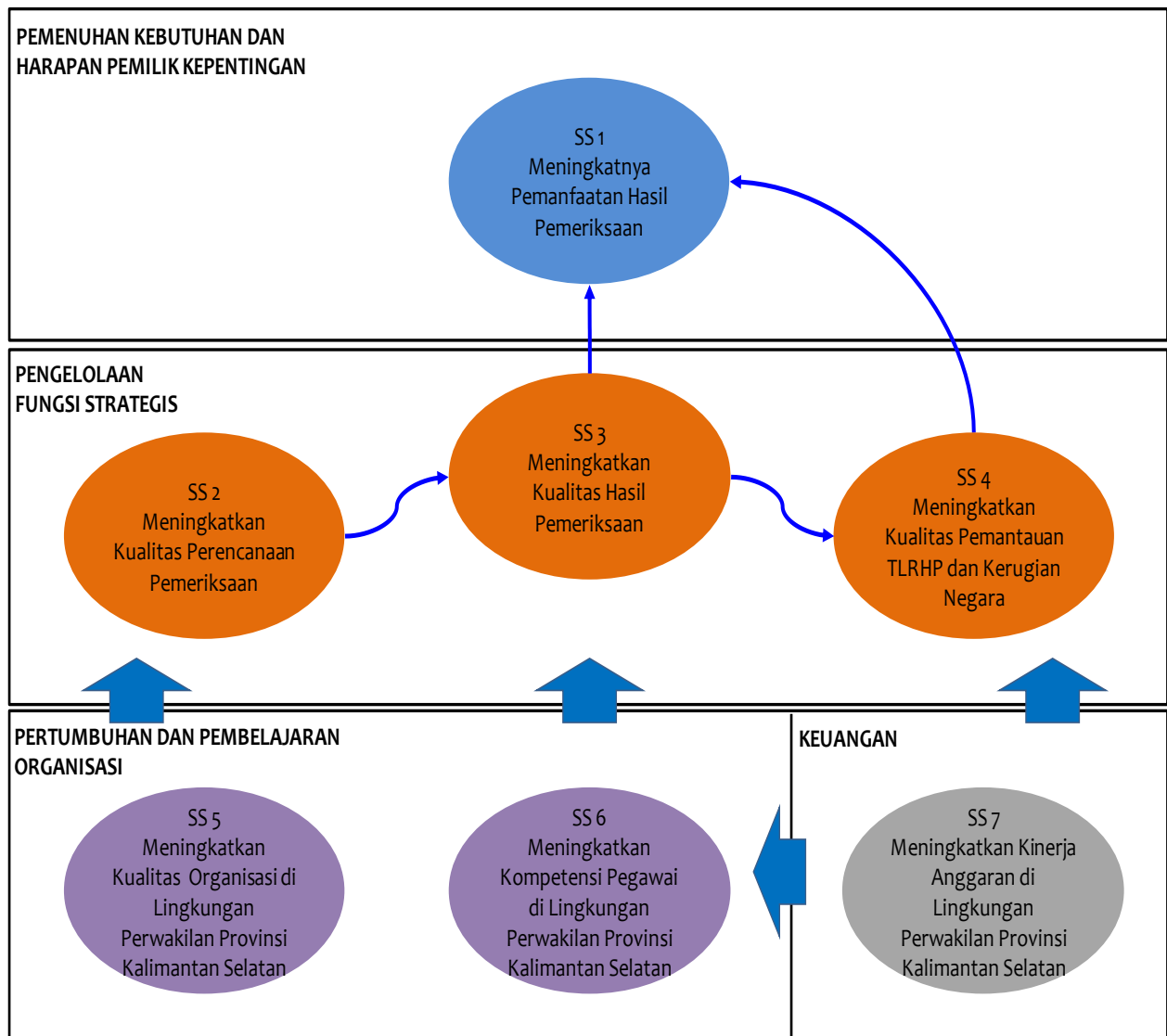
Sasaran strategis BPK yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu. Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung sasaran strategis BPK tersebut, Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI memiliki peta strategi sebagai berikut.



Gambar 2.2 Peta Strategi AKN VI

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berikut ini.



Gambar 2.3 Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian sasaran strategis BPK secara langsung terutama yang berkaitan dengan:

1. SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

2. SS. 2 Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Mutu

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui:

- a. IKU 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
- b. IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
- c. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaiannya. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku pejabat eselon I dan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pejabat eselon II pada Februari 2019.

Berikut sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019		Target Tahun 2019
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019		Target Tahun 2019
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%
		1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28
		1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90
		2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019		Target Tahun 2019
		3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
		3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
		3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%
3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Tabel 2.1 Target Pencapaian IKU Tahun 2019

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

A. Pencapaian Skor

Skor pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebesar 101,27. Skor pencapaian kinerja Tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mendapatkan skor kinerja 97,97. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 disajikan pada tabel 3.1.

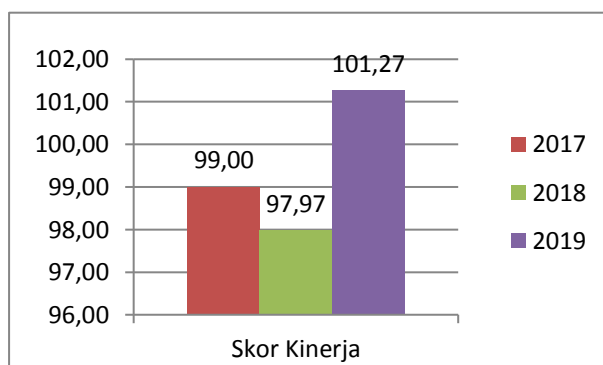
Indikator Kinerja Utama 2019		Kinerja 2019		
		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja Keseluruhan				101,27
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,84%	105
1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%	28%	100
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	100
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,62	105

Indikator Kinerja Utama 2019		Kinerja 2019		
		Target	Realisasi	Skor
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,55	91
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,80	96
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	AA	100
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,03%	103,19
3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	200%	105
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	5,80	105
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,96%	101,05
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	100
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	86,79%	105

Tabel 3.1 Pencapaian IKU Tahun 2019

B. Rincian Skor per Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut ini adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2017 s.d. 2019.



Gambar 3.1 Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2017 s.d. 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Skor 2019	Target 2019	Capaian		
						2019	2018	2017
	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan			101,27				
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	75%	80,84%	69,86%	71,56%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%	100%	100,00%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100	100%	100%	101%	100,00%
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	1
1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	95%	100%	100%	90%
		1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	100	28%	28%	28%	26,09%
		1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%	100%	-

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Skor 2019	Target 2019	Capaian		
						2019	2018	2017
1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	28	28	28	28
		1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%	100%	100%
2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%
		2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,90	4,62	4,59	4,58
		2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%
		2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100	100%	100%	100%	100%
3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	91	5,0	4,55	3,59	-
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	96	5,0	4,80	4,54	-
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%	100%	100%
3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	AA	AA	BB	A
		3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	103,19	95%	98,03%	96,43	65,96%
		3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	100	1	1	1	-
		3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	105	100%	200%	100%	-

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Skor 2019	Target 2019	Capaian		
						2019	2018	2017
		3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%	100%	100%
		3.2.6	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	105	2	5,80	91,96%	91,22%
		3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	101,05	91%	91,96%	6	4
3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%	100%	85,71%
		3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100	100%	100%	100%	75,56%
3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	105	80%	86,79%	77,38%	86,68%

Tabel 3.2 Perbandingan IKU Tahun 2017 s.d. 2019

C. Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) adalah sebagai berikut.

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas empat indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan anggaran Tahun 2019 semula sebesar Rp1.435.888.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp 1.358.967.467,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.355.799.667,00.

Realisasi IKU 1.1 Tahun 2019 sebesar 80,84% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Perhitungan tersebut berdasarkan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang tahun pemantauan serta mencakup semua LHP terbit yaitu dari Tahun 2005 s.d. 2019.

2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp903.109.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp873.387.434,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp871.193.380,00.

Realisasi IKU 1.2 Tahun 2019 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Dari 28 laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Tahun 2019 tidak ada temuan yang mengandung unsur tindak pidana yang disampaikan ke instansi penegak hukum.

3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp1.019.861.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp993.111.039,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp985.685.504,00.

Realisasi IKU 1.3 Tahun 2019 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2019, tidak ada permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur kontribusi perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dengan anggaran Tahun 2019 Rp19.196.000,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp18.183.053,00.

Realisasi IKU 1.4 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu satu bahan pendapat. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan telah menyampaikan usulan bahan pendapat kepada Ditama Revbang melalui nota dinas nomor 353/ND/XIX.BJM/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan judul “Penetapan Layanan Makan dan Minum pada Lounge di Bandara sebagai Objek Pajak Daerah”. Bahan pendapat telah diterima oleh Direktorat EPP dengan menyampaikan nota dinas kepada Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan nomor 606/ND/XII.2/11/2019 tanggal 19 November 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (satu bahan pendapat) dan tahun 2017 (satu bahan pendapat), jumlah bahan pendapat yang diusulkan pada tahun 2019 tidak meningkat karena masih fokus dalam penyelesaian tugas-tugas pemeriksaan.

SS.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp1.168.928.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.213.396.228,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.197.213.975,00.

Realisasi IKU 1.1.1 Tahun 2019 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Perwakilan Kalimantan Selatan dalam merencanakan dan pelaksanaan pemeriksaan terkait penetapan tema, fokus, dan tujuan pemeriksaan telah mengacu pada Rencana Strategis BPK 2016-2020. Jika dilihat dari realiasi Tahun 2018 (90%) dan tahun 2017 (90%), menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan dapat mempertahankan konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

2. IKU 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp2.790.706.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp3.302.677.045,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp3.263.484.719,00.

Realisasi IKU 1.1.2 Tahun 2019 sebesar 28% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 28%. Pemeriksaan kinerja yang telah selesai dilaksanakan pada semester II Tahun 2019 sebagai berikut.

- 1) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya.
- 2) Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019 Pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 3) Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin serta Instansi Terkait Lainnya.
- 4) Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komis Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

- 5) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya.
 - 6) Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Instansi Terkait Lainnya.
 - 7) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya.
3. IKU 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp1.075.224.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.117.202.461,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.102.169.889,00.

Realisasi IKU 1.1.3 Tahun 2019 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menentukan simpulan pada LHP telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan pada Program Pemeriksaan (P2).



Gambar 3.2 Penyerahan LHP kepada Entitas Pemeriksaan

SS. 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp608.805.000,00 yang kemudian

direvisi menjadi sebesar Rp660.073.157,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp647.025.308,00.

Realisasi IKU 1.2.1 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang 14 entitas yang dihadiri oleh Inspektorat serta SKPD terkait. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2019 dan Semester II Tahun 2018 pada tanggal 16-18 Desember 2019. Hasil pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan telah di-*input* ke aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Realisasi Tahun 2017 s.d. 2019 yang selalu 100%, menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengagendakan pertemuan rutin dengan *auditee* untuk membahas perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan didukung sistem informasi seperti SMP dan SIPTL.

2. IKU 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, bertujuan untuk mengukur kinerja perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp752.660.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp799.654.976,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp749.206.374,00.

Realisasi IKU 1.2.2 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 28 laporan. Pemantauan kerugian daerah telah dilaksanakan tiap semester dengan menugaskan tim pemantauan untuk memutakhirkan data kerugian daerah yang bersifat Tuntutan Perbendaharaan ataupun Tuntutan Ganti Rugi yang bersumber dari LHP BPK dan LAPIP Inspektorat. Realisasi tahun 2017 s.d. 2019 Perwakilan Kalimantan Selatan selalu dapat memenuhi target *output* yaitu sebanyak 28 laporan.

3. IKU 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp501.774.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp533.103.318,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp499.470.916,00.

Realisasi IKU 1.2.3 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah telah disampaikan kepada Direktorat EPP tepat waktu melalui nota dinas Nomor 29/ND/XIX.BJM/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 dan telah diunggah ke Portal Satker EPP. Sama halnya dengan TLRHP, berdasarkan

realisasi Tahun 2017 s.d. 2019, Perwakilan Kalimantan Selatan selalu tepat waktu menyampaikan laporan tersebut bersamaan dengan pelaksanaan konsinyering IHPS karena laporan pemantauan kerugian daerah merupakan salah satu bahan penyusunan IHPS BPK.

SS.2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini terdiri atas empat indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pemeriksaan (PFP) dan *quality assurance* (QA) dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural pemeriksaan (PSP) dengan anggaran Tahun 2019 semula sebesar Rp2.467.664.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp2.483.037.546,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp2.456.491.179,00.

Realisasi IKU 2.1. Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU 2.1 tercapai karena dalam setiap tahap pemeriksaan, *quality control* telah dilaksanakan secara berjenjang dalam bentuk lembar revidi dari setiap Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan serta *quality assurance* telah dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan dan Kepala Subauditorat dalam setiap tahapan pemeriksaan. Realisasi Tahun 2017 s.d. 2019 sebesar 100%, menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan selalu berupaya menjaga kualitas dari setiap laporan yang dikeluarkan.

2. IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp1.202.230.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.215.184.560,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.202.055.938,00.

Realisasi IKU 2.1.2 Tahun 2019 sebesar 4,62 telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 3,90. Realisasi Tahun 2017 s.d 2019 mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa tim pemeriksa dalam menjalankan tugas pemeriksaan selalu menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme sehingga kepala daerah sebagai *auditee* menilai kinerja pemeriksa Perwakilan Kalimantan Selatan sangat memuaskan.

3. IKU 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP

kepada entitas/stakeholder dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp975.459.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp980.057.226,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp966.615.404,00.

Realisasi IKU 2.1.3 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di setiap tahun selalu berupaya dapat menyampaikan seluruh LHP yang diterbitkan dengan tepat waktu. Hal itu dapat dilihat dari realisasi IKU 2.1.3 yang selalu memenuhi target dari Tahun 2017 s.d. 2019. LHP dapat disampaikan tepat waktu karena tim pemeriksa mempunyai penjadwalan pekerjaan yang baik dari tahap pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan sesuai dengan program pemeriksaan (P2). Selain itu, Kepala Subauditorat bekerjasama dengan Kepala Sekretariat Perwakilan terutama dengan Subbagian Humas & TU Kalan menjalin komunikasi yang intensif kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendukung terlaksananya acara penyerahan LHP dengan tepat waktu sesuai dengan agenda yang direncanakan.

4. IKU 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, bertujuan mengukur kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp690.877.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp776.323.957,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp758.645.144,00.

Realisasi IKU 2.1.4 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. LHP yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan tidak ada yang digugat oleh pihak manapun baik oleh masyarakat perorangan ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama Tahun 2019. Realisasi Tahun 2017 s.d. 2019 selalu 100%. Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyusunan LHP terutama LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melibatkan Kepala Subbagian Hukum untuk menganalisa atau memberikan pertimbangan terhadap temuan-temuan yang bersinggungan dengan pelanggaran hukum atau peraturan-peraturan terkait.

SS.3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK, bertujuan untuk mengukur sejauh apa pegawai memahami visi misi dan nilai dasar BPK,

dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp846.145.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp924.470.803,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp902.752.192,00.

Realisasi IKU 3.1.1 Tahun 2019 sebesar 4,55 tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,0. Penilaian IKU ini dilaksanakan dengan survei oleh pihak ketiga dengan responden acak. Survei dikirimkan kepada seluruh pegawai melalui email resmi masing-masing pegawai. Hal yang menyebabkan IKU ini tidak memenuhi target adalah masih terdapat beberapa pegawai yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan survei tersebut.

2. IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, bertujuan untuk mengetahui sejauh apa penerapan nilai dasar BPK dalam aktivitas pekerjaan di lingkungan perwakilan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp770.835.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp842.040.431,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp822.254.474,00.

Realisasi IKU 3.1.2 Tahun 2019 sebesar 4,80 tidak memenuhi target dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,0. Sama seperti IKU 3.1.1, penilaian IKU ini juga dilaksanakan dengan survei oleh pihak ketiga yang dikirimkan melalui email resmi masing-masing pegawai. IKU ini tidak memenuhi target karena masih ada beberapa pegawai yang tidak mengisi survei tersebut.

3. IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai dengan anggaran tahun 2019 semula Rp382.772.000,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp416.949.838,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp407.121.796,00.

Realisasi IKU 3.1.3 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Selama kurun waktu tahun 2019, tidak ada satu pun pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Selatan yang melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik ataupun bermasalah dengan kedisiplinan. Realisasi IKU 3.1.3 tahun 2018 juga telah memenuhi target 100%, menunjukkan bahwa pegawai Perwakilan Kalimantan Selatan mempunyai keinginan yang kuat untuk menjaga nama baik organisasi baik di hadapan *auditee* ataupun di lingkungan masyarakat luas.

SS.3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas tujuh indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp620.216.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp677.179.687,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp661.259.037,00.

Realisasi IKU 3.2.1 Tahun 2019 adalah AA (sangat memuaskan) dengan nilai 92,68 dan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu AA (sangat memuaskan). Penilaian ini disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 323/ND/XI/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 mengenai Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan realisasi Tahun 2018, realisasi IKU 3.2.1 meningkat dari yang sebelumnya mendapatkan nilai BB.

2. IKU 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp630.155.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp679.997.286,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp662.107.522,00.

Realisasi IKU 3.2.2 Tahun 2019 sebesar 98,03% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Realisasi Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 (96,43%) dan Tahun 2017 (65,96%). Perwakilan Kalimantan Selatan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi terutama penggunaan email, SISDM, dan SMP. Terkait dengan pendistribusian surat masuk, telah menggunakan aplikasi persuratan yang terintegrasi dengan email resmi masing-masing pegawai sehingga penggunaan email resmi dapat teroptimalkan. Masing-masing pegawai juga telah memanfaatkan SISDM yang terbaru sebagai database kepegawaian, pengajuan cuti, dan monitoring presensi yang dapat diakses dimana pun. Khusus untuk bidang pemeriksaan, penggunaan SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan) menjadi suatu hal yang sangat penting karena pada aplikasi ini proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan dapat terlihat dengan jelas. Pada menu pelaporan pemeriksaan, pemeriksa dapat menginput seluruh bagian LHP dari judul temuan sampai dengan nilai rekomendasi, proses ini yang menghubungkan antara SMP dengan SIPTL. Perwakilan Kalimantan Selatan telah sepenuhnya menggunakan SIPTL dalam memantau perkembangan tindak lanjut dari *auditee* sampai dengan usulan status 1 dan 4 oleh Kepala Perwakilan.

3. IKU 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun, bertujuan mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp473.144.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp515.866.284,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp503.719.058,00. IKU 3.2.3 Tahun 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu satu *best practice*. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 391/ND/XIX.BJM/9/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Usulan *Best Practice* dan Nomor 536/ND/XIX.BJM/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Perbaikan Usulan *Best Practice*, telah disusun *Best Practice* untuk mendapatkan penilaian oleh Direktorat PSMK dengan judul “Integrasi Data dan Informasi Pemeriksaan melalui Layanan Elektronik (eASy) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan”. Layanan ini bersifat elektronik yang dibangun secara mandiri oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan server yang ada dan mengintegrasikan beberapa sistem yang tersedia di BPK Pusat serta dengan instansi terkait lainnya. Pada tahun 2018, realisasi IKU ini juga menghasilkan 1 (satu) *best practice*.
4. IKU 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*, bertujuan mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp427.958.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp466.408.061,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp455.420.427,00. Realisasi IKU 3.2.4 Tahun 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 390/ND/XIX.BJM/9/2019 tanggal 6 September 2019 telah disampaikan replikasi *best practice* kepada Kaditama Revbang. Perwakilan Kalimantan Selatan telah mereplikasi *best practice* “Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan” dan “Meningkatkan Efektivitas Peran BPK Perwakilan Provinsi DIY dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah”.
5. IKU 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, bertujuan bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu dengan anggaran tahun 2019 semula Rp294.146.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp322.626.805,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp315.079.958,00. Realisasi IKU 3.2.5 Tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 disampaikan kepada Tortama KN VI dan ditembuskan kepada Kaditama Revbang dan Inspektur Utama pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan

Nomor 60/ND/XIX.BJM/1/2019 tanggal 31 Januari 2019. Laporan kegiatan bulanan dan laporan kinerja triwulanan juga selalu disampaikan tepat waktu masing-masing sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan satu bulan setelah triwulan berakhir. IKU 3.2.5 dapat tercapai karena adanya tanggung jawab yang tinggi dari sekretariat perwakilan dalam menyelesaikan atau menyusun laporan-laporan yang dimaksud. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2017 s.d. 2019, IKU ini selalu memenuhi target yaitu 100%.

6. IKU 3.2.6 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp278.210.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp303.844.024,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp296.702.702,00.

Realisasi IKU 3.2.6 Tahun 2019 sebanyak tujuh kegiatan telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu dua kegiatan. IKU 3.2.6 terpenuhi karena Perwakilan Kalimantan Selatan telah menyampaikan siaran pers pada acara Penyerahan LKPD *Unaudited* dari Kepala Daerah, Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2018, Penyerahan LHP atas LKPD TA 2018 serta Penyerahan LHP Kepatuhan dan Kinerja kepada Kepala Daerah dan DPRD. Perwakilan Kalimantan Selatan juga telah mengadakan media *workshop* pada tanggal 27 Mei 2019 dengan mengundang pimpinan redaksi dan wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik dalam rangka mengenalkan secara lebih dekat BPK sebagai suatu lembaga negara serta tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2017 s.d 2019, IKU 3.2.7 selalu mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan menaruh perhatian yang tinggi dengan selalu menjalin komunikasi dengan media massa dan masyarakat luas. Selain itu pada 9 Juli 2019, BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan visitasi dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat guna melakukan sosialisasi ke-BPK-an kepada mahasiswa.





Gambar 3.3 Acara Media *Workshop* dan Sosialisasi ke-BPK-an

7. IKU 3.2.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp764.949.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp1.394.854.905,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.384.924.575,00.

Realisasi IKU 3.2.7 Tahun 2019 sebesar 91,96% memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 91%. Pemenuhan sarana dan prasarana pada tahun 2019 tidak ada perkembangan yang signifikan karena keterbatasan lahan perkantoran dan luas bangunan yang sudah permanen. Berdasarkan realisasi dari Tahun 2017 s.d. 2019, IKU 3.2.7 selalu memenuhi target.

SS.3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran strategis ini terdiri atas dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dengan anggaran tahun 2019 semula Rp695.526.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp759.610.059,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp741.756.756,00.

Realisasi IKU 3.3.1 Tahun 2019 memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU 3.3.1 dapat terpenuhi karena Perwakilan Kalimantan Selatan berkesempatan beberapa kali mengadakan diklat secara mandiri yang difasilitasi oleh Badiklat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan jam pelatihan/pendidikan pemeriksa yang tidak

mempunyai kesempatan untuk mengikuti diklat di Badiklat/Balai Diklat. Realisasi Tahun 2017 s.d. 2019 menunjukkan bahwa Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen selalu meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan selalu memonitoring pemeriksa yang jam pelatihannya masih di bawah 40 JP.

2. IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa), bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp303.042.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp328.675.416,00 dan realisasi selama Tahun 2019 sebesar Rp320.890.908,00.

Realisasi IKU 3.3.2 Tahun 2019 telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU 3.3.2 dapat terpenuhi karena setiap pegawai telah mengikuti diklat dengan jam pelatihan/pendidikan paling sedikit 20 JP dan juga ditambah dari pelaksanaan diklat di perwakilan pada Oktober 2019 mengenai *Achievement Motivation*. Realisasi IKU 3.3.2 pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 juga telah memenuhi target sebesar 100%.

Gambar 3.4 Pelaksanaan
Akrua



Diklat LKPD Berbasis

SS.3.4 Meningkatkan Lingkungan Perwakilan Kalimantan Selatan

Kinerja Anggaran di

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan anggaran Tahun 2019 semula Rp172.720.000,00 yang kemudian direvisi menjadi Rp194.080.989,00 dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp189.661.286,00.

Realisasi IKU 3.4.1 Tahun 2019 sebesar 86,79% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. IKU ini terdiri dari empat sub-IKU yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran dengan persentase 98,20%;
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan persentase 99,85%;
- 3) Pencapaian keluaran dengan persentase 200%; dan
- 4) Efisiensi dengan persentase 54,52%.

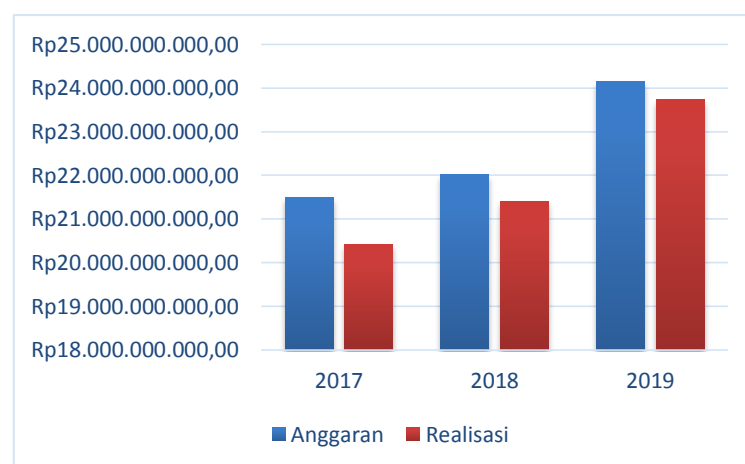
Penilaian implementasi anggaran tersebut dilakukan oleh Biro Keuangan. Realisasi IKU 3.4.1 pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

D. Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut sebagai berikut.

Keterangan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Anggaran	21.490.034.000,00	22.022.160.000,00	24.151.977 000,00
Realisasi	20.419.830.306,80	21.410.970.005,00	23.736.891.142,00
Persentase	95,02%	97,22%	98,00%

Tabel 3.3 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019



Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d. 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Secara Umum

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sumbangan untuk penyusunan Laporan Kinerja AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebesar 101,54. Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis		Skor
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	101,25
SS 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	101,35
SS 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	100,00
SS 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	101,00
SS 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan	95
SS 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Kalimantan Selatan	101,92
SS 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Kalimantan Selatan	100
SS 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Kalimantan Selatan	105

Tabel 4.1 Skor Sasaran Strategis

B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang akan diambil terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan kinerja yang sudah memenuhi target serta meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang tidak memenuhi target dengan cara meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi, dan nilai dasar BPK dengan cara membuat suatu konten atau dokumentasi tentang visi, misi, dan nilai dasar BPK yang dipublikasikan kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Selatan serta ditempatkan pada lokasi strategis seperti lobi kantor perwakilan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

LAMPIRAN

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA
SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA**

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
	3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019	Capaian		
				2019	2018	2017
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,84%	69,86%	71,56%
	1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100,00%
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%	100,00%
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	90%
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%	28%	28%	26,09%
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	-
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	28	28
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,62	4,59	4,58

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019	Capaian		
				2019	2018	2017
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
	2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%
Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,55	3,59	-
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,80	4,54	-
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	AA	BB	A
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,03%	96,43	65,96%
	3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	1	-
	3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	-
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
	3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,96%	91,96%	91,22%
	3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	5,80	6	4
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	85,71%
	3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	100%	75,56%
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	86,79%	77,38%	86,68%

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019	Realisasi	Skor
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,84%	105
		1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105
		1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%	28%	100
		1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100
3	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	100
		1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
4	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
		2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,62	105
		2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2019	Realisasi	Skor
		2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
5	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,55	91
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,80	96
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
6	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	AA	100
		3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,03%	103,19
		3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100
		3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	200%	105
		3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
		3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,96%	101,05
		3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	5,8	105
7	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
		3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	100
8	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	86,79%	105

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2019 : Rp24.151.977.000,00

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2019 : Rp23.736.891.142,00



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

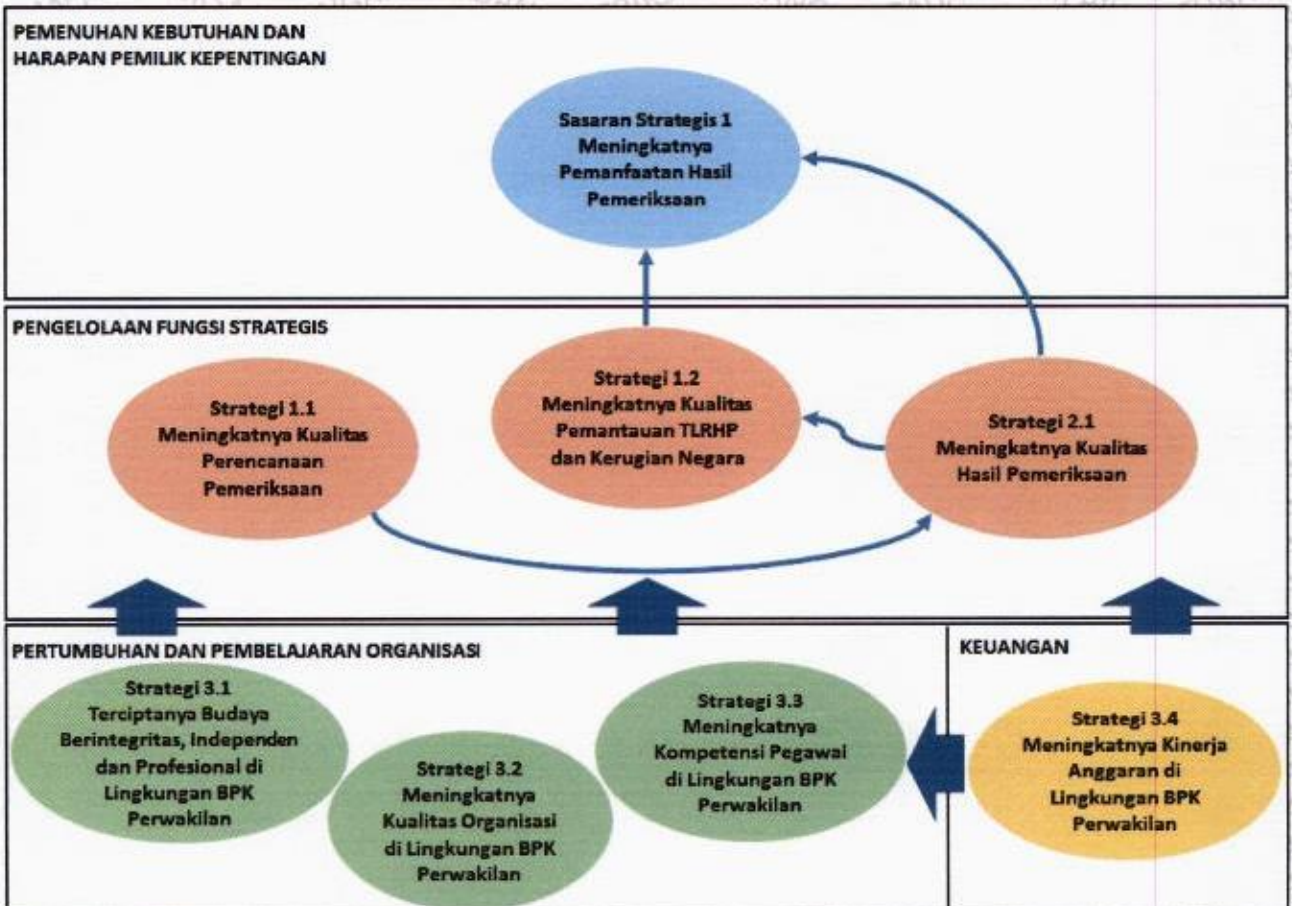
Nama : Dori Santosa, S.E., M.M.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



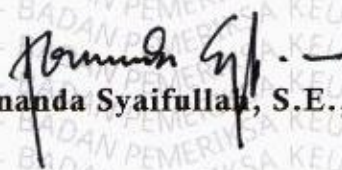
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp3.378.054.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp5.034.858.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp1.863.239.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp5.336.230.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.999.752.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3.488.778.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp998.568.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp172.689.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp22.272.168.000,00

Jakarta, Februari 2019
**Kepala Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan,**


Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp22.272.168.000,00

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dori Santosa, S.E., M.M.

Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak.

Diketahui oleh:
Anggota VI,

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.

Wakil Ketua,

Ketua,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA.

Prof. Dr. Moehamad Soerja Djanegara, CA., CPA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2019

Strategi	Indikator Kinerja		Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rp 1.435.888.000	Rp 1.358.967.467	Rp 1.355.799.667
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	Rp 903.109.000	Rp 873.387.434	Rp 871.193.380
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	Rp 1.019.861.000	Rp 993.111.039	Rp 985.685.504
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	Rp 19.196.000	Rp 19.196.000	Rp 18.183.053
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Rp 1.168.928.000	Rp 1.213.396.228	Rp 1.197.213.975
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	Rp 2.790.706.000	Rp 3.302.677.045	Rp 3.263.484.719
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	Rp 1.075.224.000	Rp 1.117.202.461	Rp 1.102.169.889
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp 608.805.000	Rp 660.073.157	Rp 647.025.308
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp 752.660.000	Rp 799.654.976	Rp 749.206.374
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	Rp 501.774.000	Rp 533.103.318	Rp 499.470.916
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	Rp 2.467.664.000	Rp 2.483.037.546	Rp 2.456.491.179
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	Rp 1.202.230.000	Rp 1.215.184.560	Rp 1.202.055.938
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Rp 975.459.000	Rp 980.057.226	Rp 966.615.404
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	Rp 690.877.000	Rp 776.323.957	Rp 758.645.144
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	Rp 846.145.000	Rp 924.470.803	Rp 902.752.192
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Rp 770.835.000	Rp 842.040.431	Rp 822.254.474
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	Rp 382.772.000	Rp 416.949.838	Rp 407.121.796
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	Rp 620.216.000	Rp 677.179.687	Rp 661.259.037
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Rp 630.155.000	Rp 679.997.286	Rp 662.107.522
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	Rp 473.144.000	Rp 515.866.284	Rp 503.719.058
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	Rp 427.958.000	Rp 466.408.061	Rp 455.420.427
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	Rp 294.146.000	Rp 322.626.805	Rp 315.079.958
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Rp 764.949.000	Rp 1.394.854.905	Rp 1.384.924.575
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	Rp 278.210.000	Rp 303.844.024	Rp 296.702.702
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	Rp 695.526.000	Rp 759.610.059	Rp 741.756.756
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	Rp 303.042.000	Rp 328.675.416	Rp 320.890.908
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Rp 172.720.000	Rp 194.080.989	Rp 189.661.286
Total Anggaran			Rp 22.272.199.000	Rp 24.151.977.000	Rp 23.736.891.142

**SKOR KINERJA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN DALAM SIMAK					
		Target	Realisasi	Skor	LANGKAH PEMBOBOTAN SKOR		
					SKOR SS	SKOR PERSPEKTIF	SKOR KINERJA
		f	g	$h = (g/f) \times 100$	k	m	n
SKOR KINERJA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							101,27
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN						101,25	
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					101,25		
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	80,84%	105,00			
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00%	100,00%	100,00			
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00%	100,00%	100,00			
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00			
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS						100,91	
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					101,36		
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95,00%	100,00%	105,00			
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28,00%	28,00%	100,00			
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100,00%	100,00%	100,00			
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					100,00		
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00			
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	100,00			
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00%	100,00%	100,00			
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					101,00		
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00			
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,62	105,00			
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00%	100,00%	100,00			
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100,00%	100,00%	100,00			
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI						99,51	
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan					95,00		
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,55	91,00			
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,80	96,00			
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	100,00%	100,00			
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan					101,92		
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	AA	100,00			
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,03%	103,19			
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	1	1	100,00			
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100,00%	200,00%	105,00			
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00%	100,00%	100,00			
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,00	5,80	105,00			
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91,00%	91,96%	101,05			
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan					100,00		
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100,00%	100,00%	100,00			
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100,00%	100,00%	100,00			
PERSPEKTIF KEUANGAN						105,00	
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan					105,00		
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80,00%	86,79%	105,00			



**BPK RI PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
JL. AHMAD YANI KM 32,5 - BANJARBARU 70721**

**WWW.BPK.GO.ID
WWW.BANJARMASIN.BPK.GO.ID
CONTACT (0511) 4784295 PSW 200 | FAX (0511) 4784296**